

# NEGARA, PASAR, DAN ELITE:

## SIAPA MENGENDALIKAN MASA DEPAN?



Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyc75@gmail.com](mailto:rudyc75@gmail.com)

12 April 2026

## **NEGARA, PASAR, DAN ELITE: SIAPA MENGENDALIKAN MASA DEPAN?**

### **Abstrak**

Makalah ini membahas hubungan antara negara, pasar, dan elite dalam membentuk arah masa depan masyarakat modern. Pertanyaan "siapa mengendalikan masa depan?" tidak dapat dijawab secara sederhana dengan menunjuk satu aktor tunggal. Dalam ekonomi politik kontemporer, masa depan dibentuk melalui interaksi tiga pusat kekuatan: negara yang menetapkan aturan, pasar yang mengalokasikan sumber daya, dan elite yang memengaruhi keputusan strategis, distribusi manfaat, serta pembentukan narasi publik. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa masa depan tidak terutama ditentukan oleh negara atau pasar secara terpisah, melainkan oleh konfigurasi kekuasaan yang terbentuk di antara keduanya, terutama ketika elite ekonomi, politik, dan teknologi mampu menguasai akses terhadap modal, data, institusi, dan opini publik. Dalam konteks global, geoeconomic fragmentation, perlambatan pertumbuhan, turunnya investasi asing, konsentrasi kekuatan di sektor digital, dan kemunduran kualitas demokrasi memperlihatkan bahwa pertarungan mengenai masa depan kini semakin terkait dengan perebutan kendali atas regulasi, teknologi, dan legitimasi. Dalam konteks Indonesia, fondasi makroekonomi relatif stabil, tetapi kualitas pertumbuhan, tantangan pekerjaan bernilai

tambah, tekanan tata kelola, risiko korupsi, dan kebutuhan reformasi institusional menunjukkan bahwa pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan masa depan masih sangat relevan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masa depan akan lebih banyak dikendalikan oleh elite bila institusi lemah, pasar terkonsentrasi, dan negara tidak akuntabel. Sebaliknya, masa depan dapat lebih demokratis dan inklusif bila negara kuat tetapi terbatas oleh hukum, pasar kompetitif tetapi diatur secara adil, dan elite tunduk pada mekanisme akuntabilitas publik. ([IMF](#))

**Kata kunci:** *negara, pasar, elite, ekonomi politik, demokrasi, oligarki, industrialisasi, tata kelola, Indonesia, masa depan.*

## **Negara, Pasar, dan Elite: Siapa Mengendalikan Masa Depan?**

### **1. Pendahuluan**

Pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan masa depan sesungguhnya adalah pertanyaan klasik ekonomi politik yang kini memperoleh bentuk baru. Pada masa lalu, persoalan ini sering dirumuskan sebagai pertarungan antara negara dan pasar: apakah negara harus menjadi penggerak utama pembangunan, ataukah pasar yang dibiarkan bekerja bebas akan menghasilkan efisiensi dan kemakmuran. Akan tetapi, abad ke-21 menunjukkan bahwa kerangka dua kutub tersebut tidak lagi memadai. Di tengah digitalisasi, kapital finansial global, perusahaan platform, kecerdasan buatan, industrial policy yang bangkit kembali, dan polarisasi politik yang menguat, muncul aktor ketiga yang tidak dapat diabaikan, yaitu elite. Elite di sini bukan sekadar orang kaya, melainkan kelompok yang memiliki kapasitas tidak proporsional untuk membentuk keputusan publik, mengendalikan modal, memengaruhi regulasi, dan menentukan arah imajinasi kolektif mengenai masa depan. Dalam konteks inilah negara,

pasar, dan elite perlu dibaca bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jaringan kekuasaan yang saling menembus. ([OECD](#))

Dunia kontemporer memberi cukup banyak bukti bahwa relasi ini sedang mengalami perubahan penting. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, seraya menekankan bahwa perlindungan perdagangan, ketidakpastian berkepanjangan, kerentanan fiskal, dan pelemahan institusi dapat mengancam stabilitas. Pada saat yang sama, UNCTAD melaporkan FDI global turun 11 persen pada 2024, dan pasar digital menunjukkan kecenderungan konsentrasi yang semakin kuat. Freedom House mencatat kebebasan global menurun untuk tahun ke-19 berturut-turut pada 2024, sementara V-Dem menyebut bahwa pada akhir 2025 terdapat 92 autokrasi dan 87 demokrasi di dunia. Data-data ini penting karena menunjukkan bahwa masa depan ekonomi, politik, dan teknologi semakin dibentuk dalam situasi yang lebih tidak setara, lebih terfragmentasi, dan lebih rentan terhadap konsentrasi kekuasaan. ([IMF](#))

Bagi Indonesia, pertanyaan ini menjadi sangat aktual. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan ketahanan makro yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, inflasi Maret 2026 tercatat 3,48 persen, BI-Rate dipertahankan pada 4,75 persen, dan cadangan devisa akhir Maret 2026 mencapai US\$148,2 miliar. Kemiskinan September 2025 turun menjadi 8,25 persen dan gini ratio menjadi 0,363. Namun di sisi lain, World Bank menilai bahwa pasar kerja Indonesia masih menghasilkan terlalu banyak pekerjaan bernilai tambah rendah, dan tantangan "good jobs" tetap besar. Sementara itu, isu korupsi, kualitas demokrasi, dan efektivitas institusi masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Dengan demikian, Indonesia tidak sedang menghadapi pertanyaan apakah masa depan akan ditentukan oleh negara atau pasar semata, melainkan apakah masa depan akan dibentuk oleh institusi publik yang bekerja untuk kepentingan bersama atau oleh koalisi elite yang berhasil menundukkan negara

maupun pasar untuk kepentingan sempit mereka. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

## **2. Negara, pasar, dan elite sebagai tiga pusat kekuatan**

Dalam pemahaman ekonomi politik, negara adalah pemegang otoritas yang memiliki legitimasi untuk menetapkan aturan, memungut pajak, mengalokasikan anggaran, menegakkan hukum, dan menentukan prioritas pembangunan. Negara memiliki kapasitas koersif sekaligus administratif. Karena itu, negara tidak pernah netral sepenuhnya. Ia selalu bekerja melalui pilihan-pilihan kebijakan yang menguntungkan sebagian aktor lebih besar daripada aktor lain. Ketika negara menetapkan subsidi, tarif, lisensi, insentif fiskal, atau proyek strategis nasional, negara sesungguhnya sedang menentukan siapa yang memperoleh peluang, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang berada di pusat akumulasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, negara bukan hanya wasit, tetapi juga arsitek arena tempat kompetisi berlangsung. Namun kapasitas arsitektural ini hanya bernilai publik bila negara memiliki integritas, akuntabilitas, dan kemampuan teknokratik yang cukup. Tanpa itu, negara mudah berubah dari pelindung kepentingan umum menjadi instrumen penguat rente. ([IMF](#))

Pasar, sebaliknya, sering dipahami sebagai mekanisme alokasi yang efisien. Melalui harga, kompetisi, dan insentif keuntungan, pasar mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan. Dalam banyak kasus, pasar memang lebih cepat dan adaptif daripada birokrasi. Namun pasar bukanlah ruang steril dari kekuasaan. OECD menegaskan bahwa digitalisasi telah mengubah dinamika persaingan secara mendasar, menciptakan bentuk-bentuk kekuatan pasar baru dan kekhawatiran atas conduct di pasar digital. Artinya, pasar kontemporer tidak cukup dipahami sebagai arena pertukaran sukarela, tetapi juga sebagai medan tempat skala, data, algoritma, jaringan, dan akses terhadap infrastruktur digital menciptakan dominasi baru. Pasar yang ideal adalah pasar yang kompetitif; tetapi pasar yang aktual sering bergerak menuju konsentrasi bila tidak diawasi secara

efektif. Karena itu, pasar membutuhkan negara, bukan untuk mematikan persaingan, melainkan untuk memastikan bahwa persaingan tetap terbuka, adil, dan tidak dirampas oleh segelintir pelaku dominan. ([OECD](#))

Elite adalah aktor yang sering hadir secara implisit, tetapi justru paling menentukan dalam praktik. Elite dapat berupa elite politik, elite bisnis, elite birokrasi, elite teknologi, elite media, bahkan elite pengetahuan. Ciri mereka bukan sekadar jabatan atau kekayaan, melainkan kemampuan untuk memengaruhi aturan, membentuk opini, dan mengarahkan sumber daya pada skala yang tidak dimiliki warga biasa. Dalam banyak negara, elite berfungsi ganda: mereka menggerakkan pembangunan sekaligus berpotensi menangkapnya. Sebuah elite yang kompeten dan visioner dapat mendorong transformasi ekonomi. Namun elite yang tertutup dan predatorial dapat memonopoli akses, melemahkan institusi, dan menghambat mobilitas sosial. Transparency International menegaskan bahwa di banyak wilayah Asia Pasifik, elite yang memiliki koneksi kuat sering membeli pengaruh politik dan memanfaatkan lemahnya penegakan hukum, sementara pembatasan ruang sipil mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Di sinilah pertanyaan tentang masa depan menjadi sangat politis: masa depan akan lebih ditentukan oleh elite ketika warga kehilangan kemampuan untuk mengoreksi arah negara dan pasar. ([Transparency.org](#))

### **3. Pergeseran lanskap global: dari globalisasi ke fragmentasi**

Selama tiga dekade terakhir, banyak orang mengira bahwa globalisasi akan melemahkan negara dan memperkuat pasar. Namun perkembangan mutakhir justru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Negara tidak lenyap; ia kembali tampil lebih aktif melalui industrial policy, subsidi strategis, pembatasan perdagangan, kebijakan teknologi, dan pengamanan rantai pasok. IMF menekankan bahwa dunia kini bergerak dalam lanskap yang diwarnai proteksionisme lebih tinggi, geoeconomic fragmentation, dan tekanan untuk memulihkan kepercayaan lewat kebijakan yang kredibel

dan berkelanjutan. Di sisi lain, UNCTAD menunjukkan bahwa investasi internasional tidak lagi bergerak dalam pola globalisasi tanpa hambatan. FDI global turun 11 persen pada 2024, dan tantangan bagi negara berkembang menjadi lebih akut. Dengan demikian, dunia tidak sedang bergerak menuju pasar global yang lebih bebas, melainkan menuju ekonomi internasional yang lebih politis. ([IMF](#))

Perubahan ini berarti masa depan semakin dikendalikan oleh pihak yang mampu menggabungkan kekuatan ekonomi dengan kapasitas geopolitik. Negara-negara besar tidak lagi hanya bersaing lewat produksi, tetapi juga lewat standar teknologi, kontrol terhadap mineral kritis, dominasi platform digital, dan pengaruh terhadap lembaga internasional. Dalam situasi seperti ini, negara berkembang menghadapi dilema ganda. Mereka harus cukup terbuka untuk menarik investasi dan teknologi, tetapi juga cukup cerdas untuk menjaga ruang kebijakan nasional. Mereka harus cukup ramah pada pasar, tetapi tidak boleh menyerahkan sepenuhnya arah industrialisasi kepada kepentingan eksternal. Mereka harus membangun elite nasional yang mampu bernegosiasi secara strategis, tetapi juga memastikan elite tersebut tidak mengubah proyek pembangunan menjadi alat pengayaan sempit. Artinya, masa depan tidak ditentukan oleh pasar global yang abstrak, melainkan oleh kemampuan negara dan elite domestik dalam menavigasi ulang globalisasi yang terfragmentasi. ([IMF](#))

#### **4. Kebangkitan negara strategis: solusi atau risiko baru?**

Salah satu gejala paling penting dalam ekonomi politik kontemporer adalah kebangkitan kembali negara strategis. IMF mengakui bahwa industrial policy dapat dibenarkan ketika terdapat market failure yang jelas, seperti externalities, coordination failures, atau under-provision of public inputs. Namun IMF juga menegaskan bahwa intervensi tersebut harus diuji secara ketat melalui analisis biaya-manfaat, dirancang secara time-bound, cost-effective, transparan, dan ditopang strong governance frameworks. Bahkan untuk green industrial policy, IMF memperingatkan adanya risiko

government failure, fiscal burden, rent seeking, dan capture. Artinya, negara yang aktif tidak otomatis lebih baik daripada negara yang pasif. Negara yang aktif baru menjadi kekuatan progresif bila ia mampu membatasi kedekatan berlebih dengan elite rente. ([IMF](#))

Dalam praktik global, kebangkitan negara strategis dapat dibaca dari kembalinya subsidi industri, kebijakan kandungan lokal, proteksi teknologi, dan dukungan besar terhadap transisi energi atau semikonduktor. Secara prinsip, kebijakan semacam itu dapat mendorong diversifikasi dan resiliensi. Namun secara politik, ia membuka ruang baru bagi elite untuk memengaruhi siapa yang akan memperoleh insentif, proteksi, atau akses proyek. Karena itu, kebangkitan negara strategis selalu bersifat ganda. Di satu sisi, ia diperlukan untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mempercepat transformasi. Di sisi lain, ia memperbesar godaan bagi pemburu rente. Pertanyaan kuncinya bukan apakah negara perlu aktif, melainkan bagaimana membuat keaktifan negara tidak berakhir sebagai privatization of public purpose oleh elite tertentu. ([IMF](#))

## **5. Pasar yang tidak lagi netral: konsentrasi, platform, dan AI**

Pasar kontemporer semakin ditandai oleh kekuatan platform, data, dan jaringan. UNCTAD melaporkan bahwa konsentrasi pasar di antara 100 perusahaan digital teratas meningkat tajam: pangsa penjualan gabungan lima digital MNE teratas naik dari 21 persen menjadi 48 persen antara 2017 dan 2025, sedangkan pangsa aset mereka naik dari 17 persen menjadi 35 persen. UNCTAD juga menekankan bahwa konsentrasi tersebut memperdalam kesenjangan global karena peluang negara berkembang untuk menciptakan dan menangkap nilai di ekonomi digital menjadi lebih kecil tanpa persaingan yang adil, infrastruktur yang baik, dan penegakan aturan kompetisi yang kuat. Ini berarti pasar digital global tidak lagi dapat dipahami sebagai ruang terbuka yang setara. Ia telah menjadi struktur hierarkis dengan gerbang masuk yang mahal dan keunggulan skala yang sangat besar. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

OECD menambahkan bahwa digitalisasi telah mengubah persaingan dengan cara yang memunculkan market power baru, sementara AI memperluas kemampuan perusahaan untuk melakukan dynamic pricing, personalized offers, dan price discrimination secara sangat granular. OECD memperingatkan bahwa praktik-praktik semacam ini dapat mengurangi consumer welfare dan mempersulit pesaing yang tidak memiliki kapasitas data serupa. Artinya, pasar modern semakin dipengaruhi oleh siapa yang menguasai data, komputasi, model, dan infrastruktur digital. Dalam kerangka itu, elite teknologi dan korporasi platform memperoleh posisi yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah kapitalisme. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengatur arsitektur pilihan, perilaku konsumen, bahkan ritme perhatian sosial. Jika negara tertinggal dalam kapasitas regulasi, maka pasar yang terlihat efisien di permukaan sesungguhnya bisa menjadi mesin konsentrasi kekuasaan baru. ([OECD](#))

Pasar seperti ini menghasilkan paradoks. Di satu sisi, inovasi digital membuka kesempatan besar bagi efisiensi, inklusi keuangan, dan produktivitas. Di sisi lain, ia menciptakan asimetri kekuasaan baru antara perusahaan besar dan masyarakat. Mereka yang mengendalikan algoritma dapat memengaruhi apa yang dilihat orang, bagaimana harga dibentuk, dan siapa yang lebih diuntungkan dalam transaksi. Dengan kata lain, pasar modern makin dekat dengan kekuasaan, bukan makin jauh darinya. Inilah sebabnya mengapa jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan masa depan tidak dapat diberikan hanya dengan menyebut "pasar." Yang sesungguhnya mengendalikan masa depan adalah pelaku pasar yang berhasil memonopoli jalur distribusi, data, dan akses terhadap kebijakan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

## **6. Elite dan penangkapan institusi**

Konsep elite menjadi penting karena baik negara maupun pasar tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Keduanya dijalankan, dinegosiasikan, dan sering kali dipelintir oleh kelompok yang memiliki akses lebih besar

terhadap informasi, uang, dan jaringan kekuasaan. Dalam banyak masyarakat, elite mampu menempati posisi penghubung antara birokrasi, bisnis, partai politik, dan media. Dari sinilah lahir kemungkinan institutional capture, yaitu kondisi ketika aturan publik yang semestinya melayani kepentingan umum berubah menjadi instrumen reproduksi kepentingan kelompok tertentu. Capture tidak selalu hadir dalam bentuk korupsi kasar. Ia dapat hadir sebagai penyusunan regulasi yang sangat menguntungkan beberapa pemain, pemberian konsesi yang tidak seimbang, pembentukan wacana publik yang membatasi kritik, atau normalisasi konflik kepentingan. ([Transparency.org](https://transparency.org))

Transparency International mencatat bahwa pada 2025 rata-rata global CPI turun menjadi 42 dan lebih dari dua pertiga negara memperoleh skor di bawah 50, sebuah sinyal luas tentang persoalan integritas sektor publik. Organisasi yang sama juga menekankan bahwa pelemahan checks and balances demokratis, pembatasan ruang sipil, dan kepemimpinan yang tidak akuntabel memperburuk persoalan korupsi. Freedom House juga menyatakan bahwa kebebasan global menurun untuk tahun ke-19 berturut-turut pada 2024, sedangkan V-Dem menggambarkan pergeseran berat ke arah otoritarianisme dan autokratisasi. Jika institusi pengawasan melemah, elite akan lebih mudah memadukan kekuatan politik dan ekonomi. Dalam jangka pendek, situasi semacam itu kadang tampak efisien karena keputusan bisa dibuat cepat. Namun dalam jangka panjang, ia merusak meritokrasi, mempersempit inovasi, dan mengikis legitimasi. ([Transparency.org](https://transparency.org))

Di sinilah letak persoalan normatif utama. Elite tidak selalu buruk; setiap masyarakat pasti memiliki elite. Yang menjadi masalah adalah ketika elite tidak lagi dibatasi oleh institusi, hukum, dan transparansi. Dalam kondisi demikian, negara tidak lagi sepenuhnya menjadi milik publik, dan pasar tidak lagi bekerja berdasarkan kompetisi yang sehat. Masa depan lalu tidak ditentukan melalui proses deliberatif yang terbuka, melainkan melalui keputusan yang lahir dari ruang-ruang eksklusif. Dalam bahasa lain, masa

depan berubah dari common project menjadi negotiated privilege.  
([Freedom House](#))

## 7. Siapa mengendalikan masa depan? Sebuah jawaban ekonomi politik

Jika seluruh uraian di atas diringkas, maka jawaban paling jujur atas pertanyaan "siapa mengendalikan masa depan?" adalah: masa depan dikendalikan oleh koalisi kekuasaan yang mampu menentukan aturan, mengalokasikan sumber daya, dan membentuk imajinasi publik. Dalam masyarakat dengan institusi kuat, koalisi ini cenderung lebih terkendali oleh hukum, pemilu, media, pengadilan, lembaga pengawas, dan persaingan pasar. Dalam masyarakat dengan institusi lemah, koalisi tersebut cenderung dikuasai elite yang dapat mengendalikan negara dan pasar sekaligus. Jadi, masa depan tidak otomatis berada di tangan negara, juga tidak otomatis di tangan pasar. Masa depan berada di tangan siapa pun yang berhasil mendesain aturan permainan dan menutup atau membuka akses bagi orang lain. ([IMF](#))

Dalam konteks ini, kontrol atas masa depan berlangsung setidaknya dalam empat arena. Pertama, **arena regulasi**: siapa yang memengaruhi hukum, lisensi, tarif, subsidi, pajak, dan standardisasi akan sangat menentukan arah akumulasi. Kedua, **arena modal**: siapa yang menguasai pembiayaan, investasi, dan infrastruktur akan menentukan proyek mana yang hidup dan mana yang mati. Ketiga, **arena data dan teknologi**: siapa yang menguasai platform, algoritma, dan jaringan digital akan menentukan bentuk pasar masa depan. Keempat, **arena legitimasi**: siapa yang mampu membentuk narasi tentang apa yang disebut modern, patriotik, efisien, atau pro-rakyat akan memperoleh keunggulan moral dalam pertarungan kebijakan. Dalam keempat arena ini, elite sering berada pada posisi strategis. Negara dapat memperkuat atau membatasi mereka; pasar dapat memperkaya atau mendisiplinkan mereka; tetapi tanpa akuntabilitas demokratik, elite akan cenderung menyatukan semua arena itu ke dalam satu ekologi kekuasaan. ([OECD](#))

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah “siapa mengendalikan masa depan?” melainkan “melalui institusi apa masa depan dikendalikan, dan untuk kepentingan siapa?” Bila masa depan dikendalikan melalui institusi yang terbuka, kompetitif, akuntabel, dan berorientasi publik, maka dominasi elite dapat dikoreksi. Namun bila institusi tertutup, pasar terkonsentrasi, dan kebebasan sipil menyempit, maka masa depan lebih mudah menjadi milik segelintir orang. Jawaban ini mungkin tidak romantis, tetapi justru realistis secara ekonomi politik.

#### **8. Indonesia sebagai kasus: stabilitas makro, tetapi pertarungan institusional belum selesai**

Indonesia menyediakan contoh yang sangat menarik tentang bagaimana negara, pasar, dan elite berinteraksi. Dari sisi makro, Indonesia tampak relatif stabil. BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dari 2024. Inflasi y-on-y Maret 2026 tercatat 3,48 persen, masih berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia  $2,5 \pm 1$  persen. BI-Rate dipertahankan di 4,75 persen pada Maret 2026, antara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah. Cadangan devisa akhir Maret 2026 mencapai US\$148,2 miliar. Dari sisi sosial, persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen, gini ratio turun menjadi 0,363, dan tingkat pengangguran terbuka November 2025 tercatat 4,74 persen dengan rata-rata upah buruh Rp3,33 juta. Semua data ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang berada dalam krisis makro. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun stabilitas makro tidak identik dengan penyelesaian persoalan ekonomi politik. World Bank menilai bahwa ekonomi Indonesia memang resilient, tetapi pasar kerja masih didominasi pekerjaan bernilai tambah rendah dan banyak gagal memberikan upah kelas menengah. Bank Dunia juga menyebut bahwa antara 2018 dan 2024 upah riil menurun rata-rata 1,1 persen per tahun. Artinya, pertumbuhan Indonesia belum otomatis

berubah menjadi peningkatan kualitas hidup yang proporsional bagi kelompok pekerja luas. Dalam perspektif makalah ini, situasi semacam ini penting karena membuka ruang bagi elite untuk mempertahankan legitimasi melalui angka agregat yang baik, sementara problem struktural di level pekerjaan, produktivitas, dan mobilitas sosial berjalan lebih lambat dari yang dibutuhkan. Maka, pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan masa depan di Indonesia sangat terkait dengan siapa yang menentukan kualitas pertumbuhan, bukan hanya lajunya. ([World Bank](#))

Di sisi kebijakan pembangunan, Indonesia sedang mengarah pada negara yang lebih aktif. IMF pada 2024 menilai bahwa Indonesia mengejar agenda pertumbuhan ambisius menuju status negara berpendapatan tinggi 2045, ditopang belanja publik, reformasi institusional, dan industrial policy yang bertujuan meningkatkan nilai tambah ekspor sektor tertentu. IMF juga menekankan bahwa agar ambisi itu berhasil, Indonesia membutuhkan reformasi horizontal yang komprehensif di bidang governance, anti-corruption, export complexity, human capital, labor resilience, dan economic openness. OECD memandang akses Indonesia sebagai proses transformasional yang dapat menjadi katalis reformasi dan penyelarasan dengan standar internasional, termasuk anti-bribery dan best practices. Dengan kata lain, negara Indonesia sedang berupaya memperbesar kapasitas strategisnya, tetapi keberhasilan upaya itu sangat bergantung pada mutu institusinya. ([IMF](#))

Contoh konkret dari negara yang lebih aktif terlihat pada agenda hilirisasi dan investasi strategis. Dalam presentasi resmi Bank Indonesia Maret 2026, disebutkan bahwa investasi industri hilir mencapai Rp584,1 triliun pada 2025 atau 30,2 persen dari total investasi, dan Danantara diposisikan sebagai katalis investasi strategis yang mendukung program prioritas nasional sambil menghasilkan sustainable commercial returns. Secara ekonomi politik, ini menunjukkan negara tidak lagi sekadar menjadi regulator, tetapi juga pengarah akumulasi. Di satu pihak, kebijakan semacam ini dapat mempercepat transformasi struktural dan memperkuat

kedaulatan ekonomi. Namun di pihak lain, ia juga meningkatkan kebutuhan akan guardrails: transparansi, evaluasi, anti-konflik kepentingan, dan akuntabilitas. Tanpa itu, industrial policy yang idealnya memperluas nilai tambah domestik dapat berubah menjadi arena distribusi rente baru bagi elite yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan. ([Bank Indonesia](#))

Dimensi politiknya tidak kalah penting. Freedom House menggambarkan Indonesia sebagai negara yang telah membuat kemajuan demokratis besar sejak 1998, tetapi masih menghadapi tantangan berupa korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik di Papua, serta penggunaan politis hukum pencemaran nama baik dan penodaan agama. Dalam laporan Freedom in the World 2025, Indonesia diberi status "Partly Free" dengan skor 56/100. Sementara itu, V-Dem Democracy Report 2026 menempatkan Indonesia di antara negara besar yang semakin kurang demokratis, dan menyebut Indonesia sebagai salah satu autokrasi elektoral dalam klasifikasi mereka. Terlepas dari perdebatan metodologis antar-indeks, arah umum pesannya jelas: kualitas demokrasi dan kontrol institusional di Indonesia masih menjadi isu sentral. ([Freedom House](#))

Aspek integritas juga perlu diperhatikan. Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor 34/100 dan peringkat 109 dari 182 negara pada CPI 2025, turun tiga poin dibanding tahun sebelumnya. Transparency juga menekankan bahwa kemunduran kepemimpinan antikorupsi, lemahnya institusi pengawasan, dan pembatasan ruang sipil memperburuk risiko korupsi secara global. Bagi Indonesia, angka ini tidak boleh dibaca sekadar sebagai indikator reputasi, tetapi sebagai sinyal bahwa pertarungan melawan capture belum selesai. Sebuah negara yang ingin aktif membangun industri, menyalurkan pembiayaan besar, dan memimpin transformasi ekonomi justru membutuhkan tata kelola yang lebih ketat, bukan lebih longgar. Jika tidak, negara akan tampak kuat secara permukaan, tetapi rapuh secara moral dan institusional. ([Transparency.org](#))

## 9. Masa depan Indonesia: di tangan siapa?

Dalam konteks Indonesia, masa depan kemungkinan besar akan ditentukan oleh hasil negosiasi antara tiga kekuatan utama. Pertama, **negara dan birokrasi strategis**, yang ingin mengarahkan pembangunan melalui APBN, hilirisasi, lembaga investasi, dan agenda kedaulatan pangan-energi-ekonomi. Kedua, **pasar dan modal**, baik domestik maupun internasional, yang menuntut kepastian regulasi, profitabilitas, dan infrastruktur. Ketiga, **elite politik-bisnis**, yang berupaya menempatkan diri di titik temu antara kebijakan dan kesempatan ekonomi. Selama ketiganya bekerja dalam kerangka hukum dan akuntabilitas, hubungan tersebut dapat menghasilkan transformasi. Namun bila koalisi elite menjadi terlalu dominan, negara akan cenderung kehilangan fungsi korektifnya, sedangkan pasar berubah menjadi arena yang semakin tertutup bagi pendatang baru. ([IMF](#))

Dalam jangka menengah, Indonesia akan diuji oleh beberapa hal. Pertama, apakah pertumbuhan 5 persen-an dapat diubah menjadi pekerjaan yang lebih produktif dan berupah lebih baik. Kedua, apakah hilirisasi akan menghasilkan learning, technology transfer, dan domestic supply chain, atau sekadar memperbesar output dengan kedalaman terbatas. Ketiga, apakah aktivisme negara melalui APBN dan lembaga investasi akan dijalankan secara profesional dan transparan. Keempat, apakah ruang demokrasi dan pengawasan sipil tetap cukup terbuka untuk mengoreksi penyimpangan. Kelima, apakah reformasi yang didorong oleh proses OECD dan tuntutan global benar-benar diterjemahkan ke dalam perbaikan governance sehari-hari. Jawaban atas lima pertanyaan ini akan lebih menentukan masa depan Indonesia daripada slogan pertumbuhan semata. ([World Bank](#))

Karena itu, masa depan Indonesia sebaiknya tidak diserahkan penuh pada satu aktor. Negara yang terlalu dominan tanpa kontrol dapat melahirkan sentralisme baru. Pasar yang terlalu dominan tanpa regulasi dapat

memperlebar ketimpangan dan konsentrasi. Elite yang terlalu dominan tanpa akuntabilitas dapat menutup akses generasi baru. Yang dibutuhkan adalah sintesis: negara yang cakap tetapi terbatas oleh hukum; pasar yang dinamis tetapi dibatasi aturan persaingan; elite yang kuat kapasitasnya tetapi tunduk pada transparansi; dan masyarakat sipil yang cukup bebas untuk melakukan koreksi. Dalam sintesis semacam itulah masa depan lebih mungkin menjadi milik publik, bukan milik segelintir kelompok. ([OECD](#))

## **10. Agenda normatif dan strategis**

Agar masa depan tidak direbut oleh koalisi elite yang sempit, terdapat beberapa agenda normatif dan strategis yang perlu ditekankan.

Pertama, Indonesia harus memperkuat **kapasitas negara sekaligus pembatasan terhadap negara**. Negara perlu lebih efektif dalam perencanaan, eksekusi, dan evaluasi pembangunan, tetapi juga harus tunduk pada audit, pengawasan legislatif, pengadilan yang independen, media yang bebas, dan partisipasi publik. Negara yang kuat tanpa kontrol adalah bahaya; tetapi negara yang lemah juga tidak mampu melindungi kepentingan publik. Maka yang dibutuhkan adalah strong but accountable state. ([IMF](#))

Kedua, pasar perlu dijaga agar tetap **terbuka dan kompetitif**. Ini mencakup penegakan hukum persaingan, regulasi terhadap platform digital, perlindungan data, interoperabilitas, dan pencegahan perilaku eksklusif. OECD menunjukkan bahwa pasar digital dan AI membawa bentuk-bentuk kekuatan pasar yang baru. Maka kebijakan persaingan tidak lagi cukup dengan instrumen lama saja; ia harus memahami data, algoritma, dan jaringan sebagai sumber dominasi. Untuk Indonesia, ini penting agar ekonomi digital tidak hanya menjadi ruang pertumbuhan GMV, tetapi juga ruang penciptaan nilai yang lebih adil bagi pelaku domestik dan UMKM. ([OECD](#))

Ketiga, proyek pembangunan harus dinilai bukan hanya dari pertumbuhan, tetapi dari **siapa yang memperoleh manfaat**. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan adalah kabar baik, tetapi World Bank mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan tetap menjadi persoalan. Maka indikator sukses pembangunan perlu diperluas: penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah riil, kualitas layanan publik, kedalaman industri, inovasi domestik, dan mobilitas antargenerasi. Dengan begitu, pembangunan tidak berhenti sebagai statistik, tetapi menjadi proses perluasan kapasitas hidup warga negara. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Keempat, reformasi antikorupsi dan tata kelola harus menjadi **arus utama**, bukan lampiran. Ketika negara semakin aktif di sektor strategis, justru risiko capture meningkat. Karena itu, pengadaan publik, proyek hilirisasi, lembaga investasi, pembiayaan infrastruktur, dan pemberian insentif harus didesain dengan transparansi yang tinggi. Proses OECD bisa menjadi katalis, tetapi dorongan internal jauh lebih menentukan. Tanpa integritas, negara strategis akan berubah menjadi negara distributif bagi elite. ([OECD](#))

Kelima, demokrasi harus dipahami bukan sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai **mekanisme koreksi pembangunan**. Freedom House dan V-Dem memperingatkan tentang kemunduran demokrasi global dan Indonesia. Peringatan ini penting karena pembangunan jangka panjang membutuhkan kepercayaan, legitimasi, dan kemampuan belajar institusional. Demokrasi yang sehat memungkinkan kebijakan yang buruk diperbaiki tanpa krisis besar. Tanpa demokrasi yang bermakna, pembetulan kesalahan sering datang terlambat, setelah biaya sosial dan fiskalnya menumpuk. ([Freedom House](#))

## 11. Penutup

Makalah ini berangkat dari pertanyaan sederhana, tetapi sangat mendasar: siapa mengendalikan masa depan? Jawaban yang diperoleh bukan jawaban tunggal. Masa depan tidak dikendalikan semata-mata oleh negara, juga tidak oleh pasar dalam arti abstrak. Masa depan dikendalikan oleh konfigurasi kekuasaan yang menghubungkan negara, pasar, dan elite. Negara menentukan aturan dan arah. Pasar menentukan insentif dan alokasi. Elite menentukan siapa yang dapat mengakses keduanya secara lebih besar daripada yang lain. Dalam masyarakat dengan institusi yang kuat, hubungan ini dapat menghasilkan pembangunan yang relatif inklusif. Dalam masyarakat dengan institusi lemah, hubungan ini mudah berubah menjadi dominasi elite dan penyempitan masa depan bagi publik. ([IMF](#))

Dalam tataran global, perlambatan pertumbuhan, turunnya FDI, meningkatnya konsentrasi ekonomi digital, dan kemunduran demokrasi menunjukkan bahwa ekonomi politik kontemporer semakin ditandai oleh pertarungan atas kontrol. Dalam tataran Indonesia, stabilitas makro yang relatif baik memberi alasan untuk optimisme, tetapi kualitas pekerjaan, tata kelola, integritas, dan kedalaman reformasi tetap menjadi medan pertarungan yang menentukan. Karena itu, pertanyaan paling penting bagi Indonesia bukan apakah negara harus kuat atau pasar harus bebas, melainkan bagaimana memastikan keduanya bekerja di bawah institusi yang mencegah elite capture dan memperluas manfaat pembangunan. ([IMF](#))

Akhirnya, masa depan yang adil tidak lahir secara otomatis dari pertumbuhan ekonomi, investasi, atau teknologi. Ia lahir dari desain institusi yang membuat kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, bila pertanyaan "siapa mengendalikan masa depan?" hendak dijawab secara normatif, maka jawaban yang seharusnya diperjuangkan adalah ini: masa depan harus dikendalikan oleh institusi publik yang terbuka, hukum yang adil, pasar yang kompetitif, dan warga yang bebas mengawasi elite. Bila syarat-syarat itu gagal dipenuhi, maka masa depan akan tetap lebih banyak menjadi milik mereka yang sudah kuat hari ini. ([Freedom House](#))

## **Glosarium**

### **Capture (penangkapan institusi)**

Kondisi ketika institusi publik, regulasi, atau kebijakan lebih banyak melayani kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan umum.

### **Checks and balances**

Mekanisme saling mengawasi antar-lembaga agar kekuasaan tidak terkonsentrasi secara berlebihan.

### **Dynamic pricing**

Penetapan harga secara fleksibel dan berubah-ubah berdasarkan data, permintaan, perilaku konsumen, atau kondisi pasar real time.

### **Elite**

Kelompok yang memiliki pengaruh tidak proporsional terhadap keputusan ekonomi, politik, atau sosial karena kekayaan, jabatan, jaringan, atau kontrol informasi.

### **Goeconomic fragmentation**

Pecahnya keterhubungan ekonomi global akibat konflik geopolitik, proteksionisme, pembatasan perdagangan, dan rivalitas teknologi.

### **Good jobs**

Pekerjaan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga produktif, berupah layak, memiliki prospek mobilitas, dan perlindungan yang memadai.

### **Industrial policy**

Kebijakan negara untuk mendorong sektor-sektor tertentu melalui insentif, proteksi, pembiayaan, atau regulasi, dengan tujuan mempercepat transformasi struktural.

### **Market concentration**

Kondisi ketika pangsa pasar, aset, atau kendali ekonomi terkumpul pada sedikit perusahaan besar.

### **Rule of law**

Prinsip bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum, dan hukum berlaku secara adil bagi semua pihak.

### **State capacity**

Kemampuan negara untuk merancang, menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif.

### **Referensi (APA 7)**

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html>

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *November 2025: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/november-2025-->

[tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-74-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html](#)

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 April). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen.*

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/04/01/2564/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-maret-2026-sebesar-3-48-persen-.html>

Bank Indonesia. (2026, 17 Maret). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi.*

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_286526.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_286526.aspx)

Bank Indonesia. (2026, 8 April). *Official reserve assets in March 2026 remained high.* [https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_287026.aspx](https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_287026.aspx)

Bank Indonesia. (2026, Maret). *Republic of Indonesia presentation book – March 2026.*

<https://www.bi.go.id/en/iru/presentation/Documents/Republic%20of%20Indonesia%20Presentation%20Book%20-%20March%202026.pdf>

Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: The uphill battle to safeguard rights.* [https://freedomhouse.org/sites/default/files/2025-02/FITW\\_World\\_2025\\_Feb.2025.pdf](https://freedomhouse.org/sites/default/files/2025-02/FITW_World_2025_Feb.2025.pdf)

Freedom House. (2025). *Indonesia: Freedom in the World 2025 country report.* <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025>

International Monetary Fund. (2024, 14 Juni). *IMF staff completes 2024 Article IV mission to Indonesia.*

<https://www.imf.org/en/news/articles/2024/06/14/pr24221-imf-staff-completes-2024-article-iv-mission-to-indonesia>

International Monetary Fund. (2024, 11 Maret). *Industrial policy coverage in IMF surveillance—Broad considerations* (Policy Paper No. 2024/008).

<https://www.imf.org/-/media/files/publications/pp/2024/english/ppea2024008.pdf>

International Monetary Fund. (2025, October). *World economic outlook: Global economy in flux, prospects remain dim.*

<https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2025/10/14/world-economic-outlook-october-2025>

OECD. (2025, 3 Juni). *Indonesia reaches key milestones in OECD accession process.* <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/06/indonesia-reaches-key-milestones-in-oecd-accession-process.html>

OECD. (2025). *Artificial intelligence and competitive dynamics in downstream markets* (OECD Roundtables on Competition Policy Papers No. 331). <https://doi.org/10.1787/ccf0624a-en>

OECD. (2025). *Competition and digital economy.* <https://www.oecd.org/en/topics/competition-and-digital-economy.html>

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025.* <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>

Transparency International. (2026). *Indonesia.* <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

UN Trade and Development. (2025, 19 Juni). *World Investment Report 2025: International investment in the digital economy.* <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2025>

UN Trade and Development. (2025, July). *Global trade update: Global trade endures policy changes and geoeconomic risks.* [https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2025d5\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2025d5_en.pdf)

V-Dem Institute. (2026). *Democracy Report 2026: Unraveling the democratic era?* [https://www.v-dem.net/documents/75/V-Dem Institute Democracy Report 2026 lowres.pdf](https://www.v-dem.net/documents/75/V-Dem%20Institute%20Democracy%20Report%202026%20lowres.pdf)

Rudy C Tarumingkeng: *Negara, Pasar, dan Elite: Siapa Mengendalikan Masa Depan?*

World Bank. (2025, 17 Desember). *Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/12/16/indonesia-s-economy-maintains-resilience-amid-global-uncertainty>

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 12 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d6386a-621c-83a0-bebe-7b2a4b62b7c5>